

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing *Staat* (bahasa Belanda dan Jerman); *State* (bahasa Inggris); *Etat* (bahasa Prancis). Istilah *Staat* mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke- 15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima bahwa kata *Staat* (*state, etat*) itu dialihkan dari bahasa Latin *status* atau *statum*.

Secara etimologis kata *status* itu dalam bahasa Latin Klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang dimiliki sifat-sifat yang tegak dan tegak itu.<sup>1</sup>

Kata “negara” mempunyai dua arti. *Pertama*, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Dalam arti ini India, Korea Selatan, atau Brazil merupakan negara. *Kedua*, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h.1

menguasai wilayah itu. Sementara itu dalam ilmu politik, istilah “negara” adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.

Didalam bukunya *Politica Aristoteles* merumuskan pandangannya tentang negara. Menurutnya negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*). Yang dimaksud negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya.<sup>2</sup>

Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa negara harus ada sebagai sarana untuk merealisasikan kewajiban-kewajiban agama. Dalam hal ini juga Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kesejahteraan umat manusia dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan hidup bermasyarakat dan bernegara, maka dalam

---

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 8

setiap kelompok hidup manusia dibutuhkan sebuah negara karena disamping untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama juga sebagai sarana mensejahterakan masyarakat. Lebih lanjut ia mengatakan menegakan pemerintahan adalah perintah agama. Maka dari itu setiap suatu negara harus memiliki suatu sistem pemerintahan tertentu untuk menjalankan tugas-tugas dari pada suatu negara tersebut. Dan dalam teorinya tentang pemerintahan, ia lebih menekankan adanya penerapan praktik penyelenggaraan sebuah negara.<sup>3</sup>

Negara dan agama tidak dapat dipisahkan, karena saling melengkapi, agama membutuhkan negara begitupun sebaliknya. Penegakan syariat merupakan kewajiban yang dibebankan Islam kepada pemeluknya. Islam memberi larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan hukum mengenai berbagai ciri kehidupan. Yang pada akhirnya kehidupan manusia akan berjalan sejahtera karena syariat agama juga berjalan dalam negara. Syariat tidak dapat berjalan dengan sempurna tanpa kewenangan politik untuk menegakan larangan dan ketentuan agama. Maka oleh sebab itu

---

<sup>3</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah*, Terj. Mufid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 43

agama dan negara harus berjalan beriringan karena pada hakikatnya hanya Islam yang memiliki kebajikan-kebajikan dan kualitas yang dapat memenuhi aspirasi spiritual dan material manusia. Islam memberikan sebuah hukum yang komprehensif untuk membimbing umat manusia. Biasanya para teoritis politik islam pertama-tama mengaitkan kepentingan terhadap negara dan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara individu. Karena itu, negara sebagai bentuk kerja sama sosial menjadi suatu kemestian, dengan menjadikan agama sebagai pedoman atau rujukan. Tujuannya agar manusia mencapai kebahagiaannya material dan spiritual dunia dan akhirat.

Didirikannya negara untuk tujuan demikian bukan saja sebagai keharusan rasional, melainkan juga agama. Islam agaknya dinilai para politik Islam Klasik dan pertengahan sebagai agama yang sejak awal yang menekankan aspek solidaritas sosial yang karenanya memiliki relevansi dengan politik dan kemasyarakatan. Sampai saat ini pemikiran politik Islam Klasik dan pertengahan, tidak ada satupun ahli yang mempunyai

pandangan agama dan negara harus dipisah. Semuanya berpandangan agama mesti mengatur negara, supaya terjadi masalahat kepada masyarakatnya. Maka oleh sebab itu, wajar jika isu hubungan agama dan negara menjadi persoalan kontroversial, kalau bukan sebagai kesulitan besar dalam merumuskan jawabannya, ketika kaum Muslimin bersentuhan dengan ide Barat tentang *nation state* yang sekuler pada masa modern yang mengharuskan pemisahan agama dan negara. Bahkan, realitas kontroversial itu, baik dalam teori maupun praktik, hingga saat ini masih terjadi.

Prinsip negara modern, dipahami sebuah consensus, dimana sejumlah warga negara dalam satu teori tertentu membentuk kesepakatan bersama untuk mengasoisasikan diri dalam asoisasi kepentingan bernama agama. Negara sendiri dibentuk dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan dasar berlandaskan kehendak kolektif warga negaranya (Volone Generale, J.J Rosesseau, 1712-1779). Tujuan negara untuk menjalankan ketertiban dan keamanan, mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi warga negaranya. Timbul suatu negara tidak akan terlepas dari teori kontrak sisioal.

Ibnu taimiyah sendiri mempunyai pandangan tentang tujuan pembentukan negara, pandangannya membangun pemerintahan berdasarkan syariat (*siasyah syar'iyah*). Risalah Ibnu Taimiyah dimulai dengan mengingatkan bahwa Tuhan telah menetapkan “pengetahuan dan pena dengan tugas untuk menyampaikan dan menyeru, serta kekuasaan dan pedang dengan penegasan superioritas Islam atas dua agama wahyu lainnya dengan argumen bahwa keduanya menyatakan agama tanpa berusaha untuk memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk eksistensinya, yakni kekuasaan jihad, dan sumber materi. Menurut Ibnu Taimiyah, masalah yang dipahami umat dewasa ini adalah bawa, disatu sisi, para pemimpin berpikir mereka dapat mencapai tujuan spiritual semata-mata dengan kesalehan. Dengan demikian mangkir dari semua partisipasi kehidupan politik, namun pada saat yang sama melarang keterlibatan orang lain. Jalan benar adalah, sekali lagi, jalan tengah (*wasath*) memperhatikan kepentingan masyarakat dalam aspek material dan moral dan terlibat dalam kekuasaan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Antoni Black, *Pemikiran Politik Islam: dari masa Nabi hingga masa kini*, Penerjemah Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati. (Jakarta ; PT SERAMBI ILMU SEMESTA, 2001), h. 299

Ibnu Taimiyah bersikukuh bahwa agama tidak dapat diamalkan tanpa kekuasaan politik. Tugas agama untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran benar-benar tidak dapat dicapai “kecuali melalui kekuasaan dan otoritas pemimpin (imam)”. Dan “keseluruh kewajiban lain yang telah ditetapkan Tuhan yaitu jihad, keadilan, haji, salat jamaah, menolong kaum yang tertindas, penetapan hudud, sebagainya tidak dapat ditunaikan kecuali melalui kekuasaan dan otoritas sultan (pemimpin)”. “Agama tanpa kekuasaan, jihad, harta, sultan, harta dan perang tanpa agama”.<sup>5</sup>

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa pemimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam agama. Bahkan tegaknya tidak mungkin direalisasikan, kecuali adanya “kepemimpinan” sedangkan seluruh anak Adam, mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal kalau tidak ada perkumpulan

---

<sup>5</sup> Antoni Black, *Pemikiran Politik Islam: dari masa Nabi hingga masa kini*, Penerjemah Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati. (Jakarta ; PT SERAMBI ILMU SEMESTA, 2001), h. 230

yang mengikat dan memecahkan kebutuhan mereka perkumpulan ini butuh seseorang pemimpin yang mengadilkan.<sup>6</sup>

Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kebutuhan manusia akan Negara di dasarkan pada akal dan hadits. Argumen rasionalnya terletak pada kebutuhan universal semua manusia untuk bergabung, bekerja sama dan menikmati berbagai manfaat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka menganut suatu agama atau tidak. Argumen rasional itu diperkuat dengan landasan sunnah atau hadits Nabi yang menekan perlunya kepemimpinan dan pemerintahan.

Fatwa Ibnu Taimiyah yang berbunyi, Enam puluh tahun dibawah penguasa yang dzalim jauh lebih baik daripada semalam tanpa pemerintahan, demikian salah satu fatwa Ibnu Taimiyah yang terasa kontroversial tokoh salaf itu memang lebih dikenal sebagai ahli hadits yang puritan dan fundamentalis. Bagian hidupnya mesti melalui penjara karena sikap kerasnya menentang pemerintahan yang dipandang tidak segaris dengan ajaran Al-

---

<sup>6</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iah Fi Islahir Raa'i War Ra'iyah*, Ter. Rofi' Munawir, Syiasah Syari'ah Etika Politik Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet. Ke- 1, 1995), h. 199



Qur'an. Ini adalah salah satu kritik Ibnu Taimiyah terhadap penguasa pada masa itu yang mengkritik pemerintahan dan membuat penguasa pada masa itu akhirnya memenjarakan Ibnu Taimiyah.

Negarawan muslim mengategorikan negara Islam ini dengan istilah *Daulah Islamiyah*, *Imamah*, atau *Darul Islam*. Seperti Ibnu Khaldun mengartikan *dulah* sebagai kepemimpinan politik yang didasarkan atas kekuasaan syara' dan raja adalah suatu keharusan sebagai pemegang wibawa itu. Menurut Muhammad Yusuf Musa menyatakan, *Dulah Islamiyah* berarti bentuk negara yang telah memenuhi unsur negara, memiliki perundang-undangan dan mengatur hak dan kewajiban antara penguasa dan rakyatnya. Sedangkan Imamah ialah pemerintahan Islam yang memiliki *dustur* atau undang-undang dasar berupa syariat Islam yakni kumpulan hukum-hukum syara' yang mengatur kehidupan umat, baik hukum itu berpautan dengan *muamalah duniawiyah*, *ahwalu syakhshiyah* maupun pertanggung jawaban pidana, dan lain-lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Zakararia Syafe'i, *Negara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta Hartomo Media Pustaka, 2012). h. 60

Dari latar belakang diatas, terserat keinginan penulis untuk mengadakan pengkajian yang lebih faktual resfresentatif mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bentuk negara. Maka degan ini penulis mengambil judul skripsi “**BENTUK NEGARA MENURUT IBNU TAIMIYAH**”.

### **B. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan tentang permasalahan Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Negara. Maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Seperti apa bentuk negara menurut Ibnu Taimiyah
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemikiran Ibnu Taimiyah

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk negara menurut Ibnu Taimiyah ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemikiran Ibnu Taimiyah ?

#### **D. Tujuan Masalah**

Mengacu pada perumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk negara menurut Ibnu Taimiyah.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemikiran Ibnu Taimiyah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bentuk Negara Menurut Ibnu Taimiyah. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan :

1. Menambah wawasan penulis mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah
2. Menambah referensi suatu saat mengenai judul yang sama

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini. Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut yaitu:

1. Nama Penulis : JUHARMEN

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas : Syar'iah

Perguruan tinggi : Universitas islam negri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Judul skripsi: KONSEP NEGARA STUDI KOMPORASI  
PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH DAN MUHAMMAD  
'ABID AL-JABIRI

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap pandangan Ibnu Taimiyah dan Muhammad ,Abdi al-Jabiri tentang negara, maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

- a. Menurut Ibnu Taimiyah, Allah sebagai penguasa alam ini tidak menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia di dalam setiap bidang, termasuk dalam bernegara maupun dalam berpolitik; oleh sebab itu, prilaku bernegarapun harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an begitu juga dengan hadits Nabi. Hal ini sesuai dengan teori kedaulatan tuhan

yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sedangkan prinsip-prinsip dasar dari al-Qur'an yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah adalah amanah dan adil. Dengan demikian, maka perilaku sebuah negara dititikberatkan kepada kewajiban-kewajiban masyarakat, bukan pada hak-hak individu. Meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan, namun dalam sebuah pemerintahan, kepala pemerintah memegang kendali dalam mengatur kehidupan bernegara selagi tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan al-Jabiri beranggapan bahwa agama sangatlah berbeda dengan politik, sehingga harus ada pemisah antara keduanya agar tidak terjadi saling memanfaatkan ataupun dimanfaatkan. Maka menurut al-Jabiri dalam sebuah negara harus ada pembagian kekuasaan yang tercakup dalam trias politika, sehingga tidak ada penguasa tunggal dalam sebuah negara. Dalam konsep persamaan hak dalam sebuah negara. Dengan konsep persamaan hak sebuah negara, al-Jabiri

sangat menekankan pentingnya bentuk negara demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak dalam pemilu. Dengan demikian al-Jabiri yakni akan terciptanya kemaslahatan dalam sebuah negara.<sup>8</sup>

2. Nama: ASEP SHOLAHUDIN

Jurusan : Siyasyah Jinayah Syar'iah

Fakultas : Sar'iah dan Hukum

Perguruan tinggi : Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta

Judl skripsi: PEMIKIRAN ETIKA POLITIK IBNU TAIMIYAH DAN IBNU KAHLDUN

Manusia sebagai makhluk sisoal tentu memiliki dimensi politik dalam kehidupannya. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik, di Indonesia kita teringat pepatah *gemah ripah loh jinawi*, orang yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai *en damonia* atau *the good life*. Selain itu, politik dalam suatu negara itu

---

<sup>8</sup> Digilib.uin-suka.ac.id

berkaitan dengan pendekatan kenegaraan, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pembagian kekuasaan. Berdasarkan pendekatan kenegaraan, kebijakan dan pembagian kekuasaan. Berdasarkan pendekatan kenegaraan, politik artinya sebagai sesuatu yang berkaitan dengan tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan negara negara dan berdiplomasi dengan negara-negara lain. Selanjutnya politik sebagai kekuasaan diartikan sebagai suatu alokasi nilai-nilai otoritatif yang menjadi bagian dari tindakan atas nama pemerintahan atau negara.

1. Bagi Ibnu Taimiyah, mengurus umat manusia itu tergolong kewajiban agama yang bernilai besar. Bahkan agama tidak bisa ditegakkan kecuali dengannya. Karena itu umat manusia tidak akan bisa mencapai kesejahteraan dengan sempurna kecuali dengan bersosialisasi karena diantara mereka saling membutuhkan. Bagi Ibnu Taimiyah sangat penting kalau pemerintahan digunakan sebagai maksud dari pencapaian tujuan agama dan mendekatkan diri pada

Tuhan. Inilah cara terbaik untuk lebih dekat pada Tuhan, karena pada saat yang sama juga akan dapat memperbaiki dan mengubah keadaan orang.<sup>9</sup>

### **G. Kerangka Pemikiran**

Dalam hal ini penyusun berusaha untuk memaparkan terlebih dahulu tentang negara dan pemerintahan menurut pandangan umum dan menurut pandangan fiqih siyasah, baik dari segi pengertiannya maupun dari segi pembagian-pembagiannya, serta bentuk negara dan pemerintahan secara umum maupun menurut fiqih siyasah, hal ini tentu digunakan sebagai landasan teoritik untuk mengetahui bentuk negara yang mana dan bentuk negara yang seperti apa yang digunakan Ibnu Taimiyah pada masa pemerintahannya, hal ini tentu tidak terlepas pula dari pembahasan mengenai bentuk dan sistem pemerintahan yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dengan memaparkan pengertian-pengertian negara dan pemerintahan serta pembagian bentuk-bentuk dan macam-macamnya maka dari sini akan dapat diketahui konsep negara yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah.

---

<sup>9</sup>repository.uinjkt.ac.id



Seperti yang dikutip oleh Nurcholis Majid dalam “Aargumen untuk keterbukaan... “: Ibnu Taimiyah memperingatkan agar orang tidak bertaklid buta pada satu masalah tertentu. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa seseorang yang tanpa sikap kritis mengikuti jejak orang lain adalah termasuk dalam kategori “*Jahiliyyah*”, dan karenanya tergolong orang yang bakal mendapat kutukan dan siksa Tuhan.<sup>10</sup>

Di sisi lain hal yang paling krusial dari sistem pemikiran Ibnu Taimiyah adalah ia meletakkan akal pikiran di belakang nas-nas agama yang tidak boleh berdiri sendir. Akal pikiran tidak mempunyai kekuasaan untuk menafsirkan, menguraikan atau menakwilkan al-Qur’an, kecuali dalam batas-batas yang diizinkan oleh kata-kata (bahasa) dan dikuatkan pula oleh Hadits. Jadi fungsi akal tidak lebih dari sekedar sebagai saksi pembenar dan penjelas dari dalil-dalil al-Qur’an.<sup>11</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah kesalahan ada dua macam: mengabaikan kewajiban dan melampaui batas. Jenis pertama

---

<sup>10</sup> Nurcholis Majid, *Argumen untuk keterbukaan, Moderasi dan Toleransi (Beberapa pokok Pandangan Ibnu Taimiyah)*, dalam Muchtar Pabotinggi (peny), *Islam antara versi, Tradisi dan Hegemoni Bukan Muslim* (Jakarta: Yayasan Obor, 1986), h. 140.

<sup>11</sup> Ahmadi Thaha, *Ibnu Taimiyah: Hidup dan Pikiran-pikirannya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), h. 52.

adalah kegagalan untuk menunaikan apa yang menjadi hak orang lain, seperti tidak mampu membayar hutang, mengabaikan kepercayaan orang lain dan kewajiban finansial. Jenis kedua adalah perbuatan agresif, seperti membunuh dan merampas harta. Keduanya merupakan kesalahan.<sup>12</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data, menelaah, mengkaji dan mengutip tulisan yang berhubungan dengan permasalahan dengan judul karya ilmiah ini.

### 2. Teknik pengolahan data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif, yaitu, metode penelitian yang tujuannya menjelaskan peristiwa yang sedang berlangsung pada masa sekarang atau masa lampau. Sedangkan untuk analisis data

---

<sup>12</sup> Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam, Prolog: Muhammad Akram Khan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 187

menggunakan analisis kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari data yang penulis peroleh dari buku-buku kemudian di ambil kesimpulan.

### 3. Teknik Penulisan

Teknik ini bertujuan agar karya ilmiah yang disusun ini bisa dipertanggung jawabkan, oleh karena itu penulis berpedoman kepada:

- a. Buku penulisan karya ilmiah fakultas syari'ah tahun 2016
- b. Buku-buku, literatur berupa jurnal, majalah, artikel, surat kabar, serta website yang berkaitan dengan judul karya ilmiah ini.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam 5 bab, dimana masing-masing bab mempunyai penekanan pembahasan mengenai topik-topik tertentu, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan membahas yang mencakup Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Study Review Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## BAB II : BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH

Dalam bab ini menjelaskan tentang Kelahiran Ibnu Taimiyah, Pendidikan Ibnu Taimiyah, Karir dan perjuangan Ibnu Taimiyah, Guru-guru dan Murid-murid Ibnu Taimiyah, dan Karya-karya Ibnu Taimiyah.

## BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Didalam bab ini akan menjelaskan tentang Pengertian Negara dan Sejarah Negara, Syarat-syarat dan Bentuk Negara, dan Tujuan dan Fungsi Negara.

## BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Didalam bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang Bagaimana Bentuk Negara Menurut Ibnu Taimiyah dan Faktor-faktor Apa Yang Mempengaruhi Pemikiran Ibnu Taimiyah.

## BAB V : PENUTUP

Didalam bab ini memuat Kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran yang patut dan perlu diberikan.